

**PERAN DAN PERSEPSI PEMANGKU KEPENTINGAN  
DALAM PENGELOLAAN INDUSTRI KELAPA SAWIT  
BERKELANJUTAN DI PROVINSI RIAU**

**TESIS**

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Pembangunan Wilayah dan Kota

Oleh :

**KHAIRI FAHRIZAL  
21040116410016**



**FAKULTAS TEKNIK  
MAGISTER PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2018**

# PERAN DAN PERSEPSI PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PENGELOLAAN INDUSTRI KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN DI PROVINSI RIAU

Tesis ini diajukan kepada  
program studi Magister Pembangunan Wilayah dan Kota  
Fakultas Teknik Universitas Diponegoro

Oleh :

**H. KHARI FAHRIZAL**

**21040116410016**

Diajukan pada sidang ujian Tesis

Tanggal 30 Mei 2018

Dinyatakan Lulus/Tidak Lulus

Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Pembangunan Wilayah dan Kota

Semarang, 30 Mei 2018

Tim Penguji:

Dr. -Ing. Wiwandari Handayani, ST, MT, MPS Pembimbing

Dr. -Ing. Prihadi Nugroho, ST, MT, MPP Penguji

Dr. Ir.Joesron Alie Syahbana, M.Sc Penguji

Mengetahui

Ketua Program Studi

Magister Pembangunan Wilayah dan Kota

Fakultas Teknik Universitas Diponegoro



**Dr. Iwan Rudiarto, ST, M.Sc**

## PERNYATAAN

Dengan isi saya menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka. Apabila dalam Tesis saya ternyata ditemui duplikasi, jiplakan (plagiat) dari Tesis orang lain/Institusi maka saya bersedia menerima saksi untuk dibatalkan kelulusan saya dan saya bersedia melepaskan gelar Magister Teknik dengan penuh rasa tanggung jawab.

Semarang, 30 Mei 2018



KHAIRI FANRIZAL  
21040116410016

Kehormatan manusia adalah pengetahuannya. Orang-orang bijak adalah suluh yang menerangi jalan setapak kebenaran. Di dalam pengetahuan terletak kesempatan manusia untuk keabadian. Sementara manusia bisa mati, kebijakan akan tetap abadi.

- Saiyidina Ali bin Abu Thalib Karamallahu Wajhah-

PERPUSTAKAAN PLANOLOGI

*Penelitian ini dipersembahkan untuk:  
Kabupaten Bengkalis dan Provinsi Riau.  
Terkhusus kepada orang tuaku, Istri dan Anak-anak Ku yang  
menjadi motivasi terbesar dalam hidupku  
untuk berbuat lebih baik...*

## ABSTRAK

Indonesia saat ini merupakan negara produsen 53 persen kebutuhan sawit global. Sementara Provinsi Riau merupakan wilayah pengembangan industri kelapa sawit terbesar di Indonesia, dengan luas kebun sekitar 2,4 juta ha, dan laju pertumbuhan ekspansi berkisar 5,5 persen per tahun. Meski berkontribusi besar terhadap perkembangan dan pembangunan ekonomi wilayah, eksistensi sawit Riau tidak terlepas dari tuduhan negatif oleh berbagai pihak. Konsekuensinya adalah dikeluarkannya Inpres Nomor 8 Tahun 2015, yang intinya adalah penundaan izin baru dan perbaikan sistem tata kelola pada industri kelapa sawit. Beberapa pihak menilai tata kelola khususnya peran pemangku kepentingan dalam industri sawit masih belum optimal. Disisi lain implementasi konsep kelapa sawit keberlanjutan disikapi dengan berbagai persepsi. Dalam konteks permasalahan tersebut diperlukan kajian peran dan persepsi pemangku kepentingan. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait, untuk mewujudkan industri kelapa sawit berkelanjutan.

Industri kelapa sawit di Provinsi Riau terus tumbuh, mempengaruhi pengembangan wilayah dan pembangunan ekonomi Riau. Perkembangan perkebunan sawit di Riau yang tersebar sporadis di daerah *remote* menjadi unit-unit ekonomi propulsif yang memiliki *trickle down effect* yang cukup luas. Sehingga sawit terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkecil disparitas. Tingginya animo masyarakat untuk terlibat dalam industri kelapa sawit menjadikan Riau sebagai wilayah dengan perkebunan sawit rakyat terluas di dunia yang melibatkan lebih dari 2 juta jiwa atau 30 persen dari total masyarakat Riau. Industri sawit juga berkembang dengan melibatkan begitu banyak pemangku kepentingan, dengan pengaruh dan kepentingan yang beragam.

Hasil analisis kajian ini menunjukkan bahwa setidaknya terdapat 25 pemangku kepentingan yang terdiri dari Pemerintah, swasta dan masyarakat. Secara umum peran pemangku kepentingan belum berjalan optimal karena masih terjadi persoalan pelaksanaan peran yang mengakibatkan disfungsi peran pada sebagian pemangku kepentingan. Dalam konteks persepsi, secara umum pemangku kepentingan memiliki pandangan dan motivasi yang baik untuk mewujudkan keberlanjutan industri kelapa sawit Riau. Terjadinya disfungsi peran bukan disebabkan kesenjangan persepsi melainkan disebabkan oleh kendala teknis seperti keterbatasan kapasitas SDM, sistem koordinasi, pembagian kewenangan, pengelolaan keuangan, keterlambatan pengesahan RTRW serta kebijakan pemerintah yang disimplementatif. Adanya kesamaan persepsi, serta semangat untuk mengoptimalkan peran pemangku kepentingan, dengan kondisi eksisting sawit yang telah berkembang merata, pembangunan wilayah dan ekonomi Riau sangat berpotensi lebih baik jika kendala yang ada dapat diatasi.

**Kata Kunci :** Kelapa Sawit Berkelanjutan, Peran Pemangku Kepentingan, Persepsi Pemangku Kepentingan.

## ABSTRACT

Indonesia is a producer 53 percent of global palm oil needs. While Riau Province is the largest area of the palm oil industry in Indonesia, with a plantation area of around 2.4 million ha, the rate of growth of expansion is around 5.5 percent per year. Although it contributes significantly to the development and economic development of the region, the existence of Riau's palm oil cannot be separated from negative accusations by various parties. The consequence is the issuance of Presidential Instruction Number 8 of 2015, which in essence is the postponement in new licenses and improvements in the governance system in the palm oil industry. Some parties consider that governance, especially the role of stakeholders in the palm oil industry is still not optimal. On the other hand, the implementation of the concept of sustainability palm oil industry is addressed with various perceptions. In the context of these problems, it is necessary to study the roles and perceptions of stakeholders. This research was conducted using descriptive qualitative methods. It is hoped that this research can be an input for the Government and related stakeholders, to realize the sustainable palm oil industry.

The palm oil industry in Riau Province continues to grow, affecting Riau's regional development and economic development. The development of palm oil plantations in Riau sporadically spread in remote areas into propulsive economic units that have a wide trickle down effect. So that oil palm is proven to be able to improve community welfare and reduce disparity. The high public interest in being involved in the palm oil industry makes Riau the region with the largest community oil palm plantations in the world, which involves more than 2 million people or 30 percent of the total Riau population. The palm oil industry also develops by involving so many stakeholders, with diverse influences and interests.

The results of this study analysis show that there are at least 25 stakeholders involved in this business, consisting of the Government, the private sector and the local communities. In general, the role of stakeholders has not run optimally because there are still problems in the implementation of roles that have resulted in role dysfunction in some stakeholders. In the context of perception, generally stakeholders have good understanding and motivations to realize the sustainability of Riau's palm oil industry. The occurrence of role dysfunction is not caused by a perceived perception gap, but caused by technical constraints such as limited human resource capacity, coordination system, division of authority, financial management, delays in the RTRW approval and implemented government policies. The similarity in perception, as well as the spirit to optimize the role of stakeholders, with the existing condition of palm oil industry that has grown evenly, the development of Riau's region and economy is potentially better, if existing constraints can be solved.

**Keywords :** Sustainable Palm Oil, Stakeholder Role, Stakeholder Perceptions.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Tabarokawata'ala yang senantiasa melimpahkan karunia serta rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis yang berjudul **“Peran dan Persepsi Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan di Provinsi Riau”**. Penyusunan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan pengajuan tesis pada Program Studi Magister Pembangunan Wilayah dan Kota. Pada kesempatan ini penulis bermaksud menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang selama ini telah mendukung, mendoakan, memotivasi serta membimbing dalam menyelesaikan tesis ini, yaitu:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis yang telah memberikan kesempatan Tugas Belajar kepada Penulis;
2. Bapak Dr. Iwan Rudiarto, ST, MSc. selaku Ketua Program Studi Magister Pembangunan Wilayah dan Kota yang memberikan segala keperluan penunjang selama tesis;
3. Ibu Dr. -Ing. Wiwandari Handayani, ST, MT, MPS, sebagai dosen pembimbing yang terus memberikan bimbingan dan motivasi, serta meluangkan waktunya untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis;
4. Bapak Dr. -Ing. Prihadi Nugroho, ST, MT, MPP, sebagai dosen penguji pertama yang telah memberikan banyak kritik dan masukan kepada penulis dalam penyempurnaan tesis;
5. Bapak Dr. Ir. Joesron Alie Syahbana, MSc sebagai dosen penguji dua yang telah memberikan banyak kritik dan masukan kepada penulis dalam penyempurnaan tesis;
6. Seluruh Informan kunci dalam penelitian ini yang telah meluangkan waktu untuk berdiskusi dan menyampaikan informasi;
7. Pemerintah Provinsi Riau yang telah memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
8. Kedua orang tua, mertua, istri dan anak-anak yang selalu memberikan doa terbaik, motivasi untuk menyelesaikan tugas belajar dan penyusunan tesis ini;
9. Teman-teman Program Studi Magister Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro semester gasal, angkatan 2016 atas kebersamaan dan semangat yang telah diberikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari kekurangan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam Tesis ini. Harapannya, semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca pada umumnya dan mahasiswa Program Studi Magister Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro pada khususnya.

Semarang, 30 Mei 2018

Penyusun

**KHAIRI FAHRIZAL**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	4
1.3. Tujuan dan Sasaran Penelitian .....	5
1.4. Manfaat Penelitian .....	6
1.4.1. Manfaat Teoritis .....	6
1.4.2. Manfaat Praktis .....	6
1.5. Ruang Lingkup .....	6
1.5.1. Ruang Lingkup Spasial .....	7
1.5.2. Ruang Lingkup Substansi .....	8
1.6. Originalitas Penelitian .....	9
1.7. Posisi Penelitian .....	10
1.8. Kerangka Pemikiran .....	11
1.9. Metodologi Penelitian.....	12
1.9.1. Teknik Pengumpulan Data .....	12
1.9.2. Metode Sampling .....	15
1.9.3. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	15
1.9.4. Kerangka Analisis .....	21
1.10. Sistematika Penulisan .....	21
<b>BAB II PERAN DAN PERSEPSI PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PENGELOLAAN INDUSTRI KELAPA SAWIT ...</b>	<b>25</b>
2.1. Sistem Tata Kelola Agro Industri Indonesia .....	25
2.1.1. Tata Kelola dan Good Governance .....	25
2.1.2. Tata Kelola Industri Kelapa Sawit .....	26
2.1.3. Sistem Kebijakan dan Regulasi Pengelolaan Kelapa Sawit .....	28

2.1.3.1.	Kebijakan Pemerintah dan Regulasi Industri Kelapa Sawit.....	28
2.1.3.2.	Kebijakan Sertifikasi <i>Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO)</i> dan <i>Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)</i> ...	31
2.2.	Pembangunan Berkelanjutan dalam Teori Kewilayahan .....	35
2.2.1.	Teori Pembangunan dan Pengembangan Wilayah ...	35
2.2.2.	Teori Pengembangan Ekonomi Wilayah.....	37
2.2.3.	Konsep Pembangunan Berkelanjutan dan Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan .....	38
2.3.	Pemangku Kepentingan, Peran dan Persepsi dalam Pengelolaan Industri Kelapa Sawit .....	42
2.3.1.	Pendefinisian dan Identifikasi Pemangku Kepentingan .....	42
2.3.2.	Peran Pemangku Kepentingan .....	46
2.3.3.	Persepsi Pemangku Kepentingan .....	48
2.3.3.1.	Memahami Persepsi .....	48
2.3.3.2.	Persepsi Pemangku Kepentingan dalam Industri Kelapa Sawit.....	50

<b>BAB III</b>	<b>TINJAUAN UMUM PROVINSI RIAU DALAM KONSTELASI INDUSTRI KELAPA SAWIT.....</b>	<b>53</b>
3.1.	Dinamika Industri Kelapa Sawit Global .....	53
3.1.1.	Industri Kelapa Sawit Global dalam Perspektif Sosial– Ekonomi .....	54
3.1.2.	Industri Kelapa Sawit Global dalam Perspektif Lingkungan.....	58
3.2.	Dinamika Industri Kelapa Sawit Nasional .....	60
3.2.1.	Industri Kelapa Sawit dalam Skema Perekonomian Nasional.....	61
3.2.1.1.	Kontribusi dan Potensi Industri Kelapa Sawit terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional.....	61
3.2.1.2.	Ancaman Terhadap Industri Kelapa Sawit.	65
3.2.1.3.	Industri Kelapa Sawit dan Ketahanan Energi .....	66
3.2.2.	Industri Kelapa Sawit Nasional dan Kelestarian Lingkungan.....	69
3.2.3.	Industri Kelapa Sawit Nasional terhadap Kehidupan Sosial.....	71
3.3.	Dinamika Perkembangan Industri Kelapa Sawit Provinsi Riau .....	72
3.3.1.	Industri Kelapa Sawit Terhadap Pengembangan Wilayah Riau .....	73
3.3.2.	Industri Kelapa Sawit dan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Riau .....	78

<b>BAB IV ANALISIS PERAN DAN PERSEPSI PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PENGELOLAAN INDUSTRI KELAPA SAWIT DI PROVINSI RIAU.....</b>	<b>83</b>
4.1. Analisis Peran Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Industri Kelapa Sawit-Riau.....	83
4.1.1. Identifikas Pemangku Kepentingan Pengelola Industri Kelapa Sawit Provinsi Riau.....	83
4.1.1.1. Peran Pemangkau Kepentingan Kunci .....	85
4.1.1.2. Peran Pemangkau Kepentingan Utama .....	100
4.1.1.3. Peran Pemangkau Kepentingan Penunjang .....	105
4.1.2. Pegelompokan Pemangku Kepentingan dalam Pengelola Industri Kelapa Sawit Riau .....	113
4.1.3. Hubungan Antara Pemangku Kepentingan dalam Pengelola Industri Kelapa Sawit Riau .....	122
4.2. Analisis Persepsi Pemangku Kepentingan terhadap Sustainability Industri Kelapa Sawit Riau.....	136
4.2.1. Persepsi Pemangku Kepentingan terhadap Isu <i>Unsustainability</i> Industri Kelapa Sawit Provinsi Riau .....	137
4.2.1.1. Industri Kelapa Sawit dan Isu Lingkungan .....	137
4.2.1.2. Industri Kelapa Sawit dan Kehidupan Sosial Masyarakat Riau .....	145
4.2.1.3. Industri Kelapa Sawit dan Isu Ekonomi ....	148
4.2.2. Persepsi Pemangku Kepentingan Terhadap Konsep <i>Sustainable Production</i> Kelapa Sawit di Provinsi Riau .....	137
4.2.3. Persepsi Pemangku Kepentingan terhadap Capaian <i>Sustainability</i> Industri Kelapa Sawit Provinsi Riau. ....	157
4.3. Hubungan Peran, Persepsi dan Pengembangan Wilayah ....	161
4.3.1. Hubungan Peran dan Persepsi Pemangku Kepentingan.....	161
4.3.2. Keberlanjutan Industri Kelapa Sawit dan Pengembangan Wilayah.....	162
4.4. Rangkuman Hasil Analisis dan Sintesa Teori .....	163
<b>BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....</b>	<b>165</b>
5.1. Kesimpulan .....	165
5.2. Rekomendasi .....	167
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>171</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	
<b>RIWAYAT PENULIS .....</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>TABEL</b>	<b>I.1</b>	Keaslian Penelitian yang Dilakukan .....	9
<b>TABEL</b>	<b>I.2</b>	Kebutuhan Data dan Informasi Penelitian .....	13
<b>TABEL</b>	<b>I.2</b>	Kebutuhan Data dan Informasi Penelitian .....	13
<b>TABEL</b>	<b>II.1</b>	Kebijakan Pelaku Kepentingan Sektor Kelapa Sawit pada Beberapa Fase Pembangunan .....	28
<b>TABEL</b>	<b>II.2</b>	Landasan Kebijakan Penyelenggaraan <i>ISPO</i> dan <i>Leading Sector</i> yang Menangani .....	30
<b>TABEL</b>	<b>II.3</b>	Perbandingan Kriteria <i>RSPO</i> dan <i>ISPO</i> .....	33
<b>TABEL</b>	<b>II.4</b>	Hasil Evaluasi Enam Tahun <i>ISPO</i> .....	34
<b>TABEL</b>	<b>II.5</b>	Isu <i>Unsustainability Palm Oil Industry</i> dari Berbagai Literatur .....	43
<b>TABEL</b>	<b>II.6</b>	Pemangku Kepentingan dalam Industri Kelapa Sait .....	45
<b>TABEL</b>	<b>III.1</b>	Daftar Negara-Negara Penghasil Minyak Kelapa Sawit Dunia (Produksi dalam Metric Ton) .....	55
<b>TABEL</b>	<b>III.2</b>	Luas Areal dan Produksi <i>CPO</i> Menurut Status Perusahaan Tahun 1970-2015.....	61
<b>TABEL</b>	<b>III.3</b>	Hambatan Kebijakan <i>Mandatory Biofuel</i> Nasional .....	68
<b>TABEL</b>	<b>III.4</b>	Luas Lahan Perkebunan Menurut Jenis Tanaman di Provinsi Riau Tahun 2011 – 2015 (ha) .....	74
<b>TABEL</b>	<b>III.5</b>	Jenis Kebun, Luas Lahan dan Produksi <i>CPO</i> Provinsi Riau Tahun 2017 .....	75
<b>TABEL</b>	<b>III.6</b>	Tiga Lapangan Usaha yang Berkontribusi Besar Terhadap PDRB Provinsi Riau Tahun 2012-2016 (dalam persen) .....	79
<b>TABEL</b>	<b>III.7</b>	Jumlah Lahan dan Produktifitas Masing-Masing Komoditas Perkebunan Tahun 2016 .....	80
<b>TABEL</b>	<b>III.8</b>	Eksistensi Industri Kelapa Sawit Riau Terhadap Industri Kelapa Sawit Nasional .....	81
<b>TABEL</b>	<b>IV.1</b>	Identifikasi Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan Industri Kelapa Sawit Provinsi Riau .....	84
<b>TABEL</b>	<b>IV.2</b>	Pemangku Kepentingan Kunci Industri Dalam Industri Kelapa Sawit Riau .....	85
<b>TABEL</b>	<b>IV.3</b>	Pemangku Kepentingan Utama Industri Kelapa Sawit Riau.....	101
<b>TABEL</b>	<b>IV.4</b>	Pemangku Kepentingan Penunjang Industri Kelapa Sawit Riau .....	106
<b>TABEL</b>	<b>IV.5</b>	Peran Pemangku Kepentingan dan Kendala Pelaksanaannya .....	108

<b>TABEL</b>	<b>IV.6</b>	Tingkat Kepentingan (Interest) Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan Industri Kelapa Sawit di Provinsi Riau .....	114
<b>TABEL</b>	<b>IV.7</b>	Tingkat Pengaruh (Influence) Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan Industri Kelapa Sawit di Provinsi Riau .....	115
<b>TABEL</b>	<b>IV.8</b>	Pengelompokan Pemangku Kepentingan .....	123
<b>TABEL</b>	<b>IV.9</b>	Potensi Interaksi Antara Pemangku Kepentingan.....	123
<b>TABEL</b>	<b>IV.10</b>	Disfungsi Peran Pada Kelompok Pemangku Kepentingan .....	134
<b>TABEL</b>	<b>IV.11</b>	Perubahan Luas Hutan, Deforestasi dan Luas Perkebunan Kelapa Sawit Di Provinsi Riau 1950-2014..	139
<b>TABEL</b>	<b>IV.12</b>	Persepsi Pemangku Kepentingan Terhadap Keberlanjutan Produksi Kelapa Sawit-Riau .....	151

PERPUSTAKAAN PLANOLOGI

## DAFTAR GAMBAR

<b>GAMBAR 1.1</b>	Sebaran Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia .....	2
<b>GAMBAR 1.2</b>	Peta Wilayah Administrasi Provinsi Riau .....	7
<b>GAMBAR 1.3</b>	Diagram Posisi Penelitian dalam Bidang Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah .....	10
<b>GAMBAR 1.4</b>	Diagram Kerangka Pemikiran Penelitian .....	11
<b>GAMBAR 1.5</b>	Diagram Pengaruh-Kepentingan .....	20
<b>GAMBAR 1.6</b>	Diagram Kerangka Analisis Penelitian .....	22
<b>GAMBAR 2.1</b>	Ilustrasi Mata Rantai Usaha Perkebunan dan Industri Kelapa Sawit.....	26
<b>GAMBAR 2.2</b>	Kerangka Hukum Pengembangan Kelapa Sawit Indonesia.....	27
<b>GAMBAR 2.3</b>	Perubahan Fokus Kebijakan Pembangunan Ekonomi dan Strategi Pembangunan .....	38
<b>GAMBAR 2.4</b>	Kerangka Teori Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan....	39
<b>GAMBAR 2.5</b>	Diagram Sebab-Akibat Permasalahan Keberlanjutan Terkait Ekspansi Kelapa Sawit (Dalam Konteks Indonesia) .....	44
<b>GAMBAR 2.6</b>	Integrasi dan Interaksi Pemangku Kepentingan dalam Implementasi Program/Kegiatan Pembangunan .....	49
<b>GAMBAR 2.7</b>	Model Baru Kerangka Konsep Keberlanjutan Industri Kelapa Sawit .....	50
<b>GAMBAR 3.1</b>	Peta Produksi Minyak Kelapa Sawit Dunia (Ton) .....	53
<b>GAMBAR 3.2</b>	Produksi Minyak Nabati Per Hektar pada Tiap Sumber Vegetasi 2004-2006.....	56
<b>GAMBAR 3.3</b>	Perbandingan Antara Jumlah Lahan dan Hasil Produksi Minyak Nabati Dunia .....	56
<b>GAMBAR 3.4</b>	Perbandingan Harga Komoditas Pneghasil Minyak Nabati Dunia.....	57
<b>GAMBAR 3.5</b>	<i>Time Series</i> Perkembangan Industri Sawit Nasional.....	60
<b>GAMBAR 3.6</b>	Jumlah Total Produksi <i>CPO</i> Pada Sepuluh Negara Produsen Kelapa Sawit Dunia (dalam *000 Matric Ton)	62
<b>GAMBAR 3.7</b>	Jumlah Ekspor <i>CPO</i> Pada Sepuluh Negara Produsen Kelapa Sawit Dunia (dalam *000 Matric Ton) .....	63
<b>GAMBAR 3.8</b>	Negara Tujuan Ekspor <i>CPO</i> Nasional (dalam *000 Matric Ton).....	64
<b>GAMBAR 3.9</b>	Skenario Analisis Penggunaan Kelapa Sawit Sebagai Alternatif Solusi Defisit Energi dan Devisa Negara.....	67
<b>GAMBAR 3.10</b>	Skala Tantangan Pengembangan <i>Biofuel</i> Indonesia .....	68
<b>GAMBAR 3.11</b>	Peta Sebaran Lahan Gambut Provinsi Riau.....	72
<b>GAMBAR 3.12</b>	Diagram Luasan Lahan Perkebunan Perkomoditas-Riau	74

<b>GAMBAR 3.13</b>	Komposisi Sebaran Perkebunan Kelapa Sawit Pada Tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Riau .....	75
<b>GAMBAR 3.14</b>	Peta Sebaran Perkebunan di Provinsi Riau .....	76
<b>GAMBAR 3.15</b>	Peta Perkebunan dan Hak Guna Usaha Bidang Perkebunan Provinsi Riau .....	77
<b>GAMBAR 3.16</b>	Diagram Pertumbuhan PDRB Provinsi Riau 2012-2016	78
<b>GAMBAR 3.17</b>	Diagram Komposisi Kontribusi Tiap Lapangan Usaha Terhadap PDRB-Riau Tahun 2017 .....	79
<b>GAMBAR 4.1</b>	Matriks Pemetaan Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan Industri Kelapa Sawit di Provinsi Riau .....	116
<b>GAMBAR 4.2</b>	Pemetaan Pemangku Kepentingan ( <i>Stakeholder Mapping</i> ) Pengelola Industri Kelapa Sawit di Provinsi Riau .....	121
<b>GAMBAR 4.3</b>	Rantai Bisnis Industri Kelapa Sawit Provinsi Riau .....	122
<b>GAMBAR 4.4</b>	Diagram Persepsi Pemangku Kepentingan Terhadap Keberlanjutan Produksi Industri Kelapa Sawit Riau .....	157
<b>GAMBAR 4.5</b>	Diagram Hubungan Peran, Persepsi Terhadap Keberlanjutan.....	161
<b>GAMBAR 4.6</b>	Implementasi Peran Terhadap Keberlanjutan Industri Sawit di Provinsi Riau .....	162

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>LAMPIRAN 1</b>	Profil Informan Kunci (Key Informan).....	177
<b>LAMPIRAN 2</b>	Verbatim Hasil Wawancara Pemangku Kepentingan.....	179
	<b>2.A</b> : Verbatim Wawancara Apkasindo .....	179
	<b>2.B</b> : Verbatim Wawancara Disdagkop-UKM Provinsi Riau .....	186
	<b>2.C</b> : Verbatim Wawancara Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (TPH-Bun).....	192
	<b>2.D</b> : Verbatim Wawancara Dinas Perindustrian Provinsi Riau .....	207
	<b>2.E</b> : Verbatim Wawancara Perseroan Terbatas Perkebunan Nasional V Pekanbaru.....	214
	<b>2.F</b> : Verbatim Wawancara Wahana Lingkungan Hidup Riau (WALHI) Riau .....	224
	<b>2.G</b> : Verbatim Wawancara Bappeda Provinsi Riau ....	236
	<b>2.H</b> : Verbatim Wawancara Badan Pertanahan Nasional Kanwil Riau.....	242
	<b>2.I</b> : Verbatim Wawancara Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.....	248
	<b>2.J</b> : Verbatim Wawancara Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (GAPKI) Riau.....	252
	<b>2.K</b> : Verbatim Wawancara Lembaga Penelitian dan Pengabdian (LPPM) Universitas Riau.....	266
	<b>2.L</b> : Verbatim Wawancara Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada Yogyakarta.....	274
	<b>2.M</b> : Verbatim Wawancara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) .....	280
<b>LAMPIRAN 3</b>	Kategorisasi Hasil Wawancara .....	291
<b>LAMPIRAN 4</b>	Riwayat Penulis.....	317

## DAFTAR SINGKATAN

APK	: Area Peruntukan Kehutanan
APKASINDO	: Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia
ASN	: Aparatur Sipil Negara
ATR	: Agraria dan Tata Ruang
Bappeda	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bappenda	: Badan Pendapatan Daerah
BBM	: Bahan Bakar Minyak
BMAD	: Bea Masuk Anti Dumping
BPDP-KS	: Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
BPN	: Badan Pertanahan Nasional
BPS	: Badan Pusat Statistik
<i>CPO</i>	: <i>Crude Palm Oil</i>
<i>CoO</i>	: <i>Certificate of Origin</i>
DBH	: Dana Bagi Hasil
DJP	: Direktorat Jenderal Pajak
DJBC	: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
ESDM	: Energi Sumber Daya Mineral
<i>FAO</i>	: <i>Food Agriculture Organisation</i>
<i>FGD</i>	: <i>Focus Group Discussion</i>
FoKSBI	: Forum Komunikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia
GAPKI	: Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia
GRK	: Gas Rumah Kaca
Ha	: Hektar
HGU	: Hak Guna Usaha
HPH	: Hak Pengusahaan Hutan
HTI	: Hutan Tanaman Industri
<i>ISPO</i>	: <i>Indonesian Sustainable Palm Oil</i>
KAN	: Komite Akreditasi Nasional
KEK	: Kawasan Ekonomi Khusus
Kepmen	: Keputusan Menteri
Kepres	: Keputusan Presiden
KID	: Kawasan Industri Dumai
KITB	: Kawasan Industri Tanjung Buton
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
LHK	: Lingkungan Hidup dan Kehutanan
LS	: Lembaga Sertifikasi
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
<i>NEP</i>	: <i>New Economic Policy</i>

NES	: <i>Nucleus Estate and Smallholder</i>
NGO	: <i>Non Government Organisation</i>
NKT	: Nilai Konservasi Tinggi
NTP	: Nilai Tukar Petani
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
PASPI	: <i>Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute</i>
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
PBB	: Pajak Bumi Dan Bangunan
PBN	: Perkebunan Besar Negara
PBS	: Perkebunan Besar Swasta
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
PDRB-ADHK	: Produk Domestik Regional Bruto – Atas Dasar Harga Konstan
PDRB-ADHB	: Produk Domestik Regional Bruto – Atas Dasar Harga Berlaku
Perpres	: Peraturan Presiden
Permen	: Peraturan Menteri
PKS	: Pabrik Kelapa Sawit
PPh	: Pajak Penghasilan
PMA	: Penanaman Modal Asing
PMPTSP	: Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PP	: Peraturan Pemerintah
PPN	: Pajak Pertambahan Nilai
PPNS	: Penyidik Pegawai Negeri Sipil
PR	: Perkebunan Rakyat
PROPER	: Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan
PUP	: Penilai Usaha Perkebunan
RAPBD	: Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Renja	: Rencana Kerja
REDD	: <i>Reducing Emission From Deforestation and Forest Degradation</i>
RKPD	: Rencana Kerja Perangkat Daerah
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RTRW	: Rencana Tata Ruang Wilayah
RSPO	: <i>Roundtable Sustainable Palm Oil</i>
SDA	: Sumber Daya Alam
SDM	: Sumber Daya Manusia
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
TBS	: Tandan Buah Segar
UKM	: Usaha Kecil dan Menengah
UPT	: Unit Pelaksana Teknis
UU	: Undang-Undang
WALHI	: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
WTO	: <i>World Trade Organisation</i>